

Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia)

Mohammad Takdir

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Guluk-Guluk, Sumenep Madura
Jl. Bukit Lancaran, PP. Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, 69463
mohammad.takdir@yahoo.com/ 08179445575

Abstract

This paper aims to identify patterns of social and religious conflicts in Indonesia. The pattern of religious conflict include the type of conflict, the frequency of conflict, the development and spreading of the conflict, the issue of the causes of conflict, actors, and the impact of the conflict. This research used a sociological approach to reveal the social impact of the rise of religious conflicts. This research is a case study based on sectarian and communal violence that occurred in the some regions. The theory used to identify patterns of religious and social conflict are Louis Coser theory and theory of ethnic conflict from Jaques Jacques Bertrand. This study shows that the Indonesian people have the capacity to respond the issues causing religious conflict in the form of peaceful demonstrations. Our duty is to encourage people to make a peaceful protest as the main option in order to prevent larger conflicts. The issues that drove the conflict in various regions vary widely so that the eradication of violence needs to be designed in accordance with the variation of religious conflict issues that dominate each regions. The results of this study also shows that the issue of religious conflict that faced each different regime. In the New Order regime, the issue of communal becoming the most dominant issue occurs. While the reform era more face sectarian religious conflict related issues.

Key Word: Conflict, Religion, Sosial, Sektarian, and Communal

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola konflik agama dan sosial di Indonesia. Pola konflik keagamaan bisa meliputi jenis konflik, frekuensi konflik, perkembangan dan persebaran konflik, isu penyebab konflik, pelaku, dan dampak dari konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui dampak sosial dari munculnya konflik agama. Penelitian ini merupakan studi kasus kekerasan berbasis sektarian dan komunal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Teori yang dipakai untuk mengidentifikasi pola-pola konflik agama dan sosial adalah teori Louis Coser dan teori konflik etnis dari Jaques Jacques Bertrand. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk merespon isu-isu penyebab konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai. Tugas kita adalah mendorong masyarakat untuk menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama demi mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Isu-isu yang mendorong terjadinya konflik di berbagai daerah sangat bervariasi sehingga langkah-langkah penanganan kekerasan perlu didesain sesuai dengan variasi isu-isu konflik keagamaan yang mendominasi masing-masing wilayah. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa isu konflik keagamaan yang dihadapi masing-masing rezim pemerintahan berbeda. Pada rezim orde baru, isu komunal menjadi isu yang paling dominan terjadi. Sementara pada era reformasi lebih banyak menghadapi konflik keagamaan terkait isu sektarian.

Kata Kunci: Konflik, Agama, Sosial, Sektarian, dan Komunal

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir ini, ketegangan intra-ummat beragama dan antar-ummat beragama senantiasa menghiasi perjalanan bangsa ini. Munculnya berbagai ketegangan, semakin memunculkan konflik yang terbilang akut dan menjadi *phobia* bagi kedamaian hidup manusia. Betapa tidak, konflik yang berlarut-larut mengakibatkan semangat perdamaian dan kebebasan dalam konteks keberagaman semakin sulit diwujudkan. Dalam beberapa tahun terakhir, rangkaian konflik dan kekerasan bernuansa agama terus menerus terjadi di Indonesia, mulai dari kerusuhan bernuansa agama di kota-kota provinsi pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik antar kelompok agama di Sulawesi dan Maluku pada 1998-2001, hingga mobilisasi laskar jihad berbasis agama dan pengoboman yang dilakukan kelompok teroris atas nama "jihad" pada 2000-2005.¹

Pada tahun 2005 silam, kita masih ingat ketika terjadi tiga peristiwa penting terkait konflik berlatar agama yang muncul seiring dikeluarkannya 11 fatwa MUI. Dua diantara fatwa itu sangat krusial, karena menyangkut masalah pelabelan dan penilaian "sesat dan menyesatkan" atas aliran Ahmadiyah dan pelarangan atas faham-faham seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Efek domino dari fatwa itu, pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di kampus Mubarak milik Ahmadiyah di Parung, Bogor. Ketika itu, sekelompok Muslim menyerbu markas Ahmadiyah dan menyuarakan tuntutan pembubaran salah satu aliran dalam Islam ini. Kejadian ini menjadi preseden buruk bagi peristiwa-peristiwa serupa atas jamaah Ahmadiyah di beberapa tempat lain, seperti di Bandung, Tasikmalaya, dan Garut.

Di samping itu, ketegangan juga terdiri antar sekelompok Muslim yang memiliki pandangan liberal dan sekuler dalam masalah-masalah seputar relasi agama dan politik. Mereka yang liberal, yang secara faktual mendukung faham pluralisme diklaim sebagai kelompok ahli "bid'ah" yang harus dieliminasi dari permukaan bumi pertiwi tercinta. Atas nama memuliakan Islam, kelompok-kelompok liberal, sekuler, dan penganut pluralisme semacam ini kerap kali menerima berbagai ancaman baik berupa psikis maupun fisik. Ketegangan semacam ini, masih sering kita jumpai dari berbagai kelompok Ormas Islam yang saling bertentangan, karena berbeda pandangan dan pemikiran.

Bersamaan dengan dua kasus konflik intra Muslim di atas, kita juga sering melihat peristiwa ketegangan yang terjadi antara Muslim dan non-Muslim, utamanya Kristen. Semisal, konflik yang terjadi di Ambon, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Kita juga bisa mencermati, kasus pemurtadan di sebuah desa Jalaprang (Sukaluyu) yang dilakukan dengan kekerasan. Praktek

¹ Ihsan Ali Fauzi, Rudi Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Pangabeian, *Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), h. 1.

pemurtadan ini, bermula dengan dalih pengobatan yang pada akhirnya berujung pada pelecehan seksual. Atas dasar itu, selompok massa Muslim yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Forum Ukhuwah Ummat Islam (FUUI), yang di dalamnya tergabung dalam elemen ummat Islam, menutup dan menyegel bangunan-bangunan Gereja itu.²

Di saat iklim keberagaman dan konflik mulai pulih, kekerasan atas nama agama kembali bergolak. Sikap tidak menerima terhadap keberadaan faham dan keyakinan lain, menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang berakibat pada perusakan tempat ibadah dan bentrokan fisik yang berujung jatuhnya korban jiwa. Bentrokan antara Jamaah Ahmadiyah dan warga di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang menewaskan tiga orang dan enam lainnya mengalami luka berat merupakan potret buram kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia.

Padahal, kekerasan atas nama apapun tidak bisa dibenarkan. Apalagi tindakan kekerasan itu mengatasnamakan agama demi menghakimi suatu kelompok yang berbeda keyakinan dengan kita. Begitu juga dengan bentrokan yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah yang melibatkan ormas keagamaan dan aparat kepolisian. Tidak heran bila tragedi kekerasan itu bertubi-tubi menghancurkan harmoni kehidupan masyarakat kita. Setelah tragedi kekerasan menggemparkan publik di Cikeusik dan Temanggung, insiden kekerasan yang bernuansa SARA kembali menimpa sebuah Yayasan Pondok Pesantren Islam (YAPI) di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dalam insiden tersebut, sejumlah santri mengalami luka berat akibat serangan sekelompok orang tak dikenal yang datang secara tiba-tiba.

Semakin meluasnya tindakan kekerasan di Indonesia, semakin besar pula ketakutan masyarakat akan hadirnya berbagai aksi serupa yang mengatasnamakan agama. Kebebasan beragama sudah barang tentu menjadi ancaman tersendiri yang bisa mengancam harmoni toleransi antar sesama. Bahkan, menurut penilaian Moderate Muslim Society, tahun 2010 dinilai sebagai tahun kelam kebebasan beragama di Indonesia. Sepanjang tahun 2010, setidaknya terjadi 81 kasus intoleransi. Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan The Wahid Institute sepanjang 2010, ditemukan 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Yang mengesankan, pelaku pelanggaran kebebasan beragama paling banyak justru pemerintah daerah dan kepolisian.

Penelitian tentang konflik agama yang terjadi selama ini, menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan agama yang kian hari mengalami ketidakpastian. Di tengah upaya untuk menimalisir meluasnya konflik serupa, kebutuhan yang cukup mendesak perhatian adalah ketersediaan data yang akurat mengenai bagaimana sesungguhnya pola konflik dan kekerasan yang terjadi selama ini. Hal ini amat disayangkan, karena pemahaman mengenai pola

² Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005), h. XVIII.

konflik dan kekerasan keagamaan itu sangat diperlukan sebagai landasan program dan penentuan prioritas dalam rangka mengatasi konflik dan kekerasan yang menjadi sindrom bagi harmoni keberagaman di Indonesia.

Setelah mengetahui tentang pola-pola konflik dan kekerasan agama, penelitian ini juga akan menguraikan landasan resolusi konflik sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama maupun sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gagasan tentang resolusi konflik dan perdamaian agama bukan sebagai tujuan akhir dalam mencermati pola-pola konflik yang terjadi, melainkan sebagai sarana untuk memberikan tawaran solusi dan sumbangan keilmuan demi memberikan kesadaran kepada pihak yang terlibat konflik.

Setiap konflik yang muncul tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi harus melalui tahapan dan model baru yang lebih progresif bagi masa depan agama dan masyarakat yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa teori tentang resolusi konflik bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan setiap tindakan kekerasan yang berakibat konflik agama, melainkan hanyalah sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat akademis demi membantu aparat keamanan dalam memperkuat semangat toleransi antar sesama yang berbeda keyakinan maupun seiman.

Penelitian tentang konflik dan kekerasan agama ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi pola-pola konflik yang lazim terjadi di Indonesia sebagai tolak ukur untuk mengetahui beragam pola persebaran konflik dan kekerasan yang cukup akut menghantui dinamika kehidupan masyarakat. Selain pola-pola konflik dan kekerasan, penelitian ini juga akan mencermati akar munculnya konflik dan dampaknya bagi masyarakat. Kita juga akan mempertanyakan komitmen aparat keamanan dalam mengatasi konflik keagamaan yang sering terjadi dalam dekade terakhir ini. Sejauh ini, peran aparat keamanan seolah-olah tidak memiliki wibawa untuk meredam gejala konflik, bahkan seringkali tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan kekuasaannya dalam menindak tegas pelaku kekerasan yang menebarkan aroma kebencian dan konflik yang mengatasnamakan agama.

Teori Konflik Keagamaan

Konflik di dunia seolah-olah tidak berhenti sedetik pun, bahkan semakin menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang cukup tajam. Konflik tak ubahnya seperti air laut yang tak pernah surut dari permukaan, yang terus menerus memunculkan gejala-gejala baru dalam dinamika kehidupan. Terjadinya konflik bagaikan bola salju yang terus bergelinding tanpa henti menyusuri derasnya arus egosentrisme dalam perilaku dan tindakan manusia. Begitulah aroma konflik yang sulit diredam seperti api dalam sekam yang sulit padam karena

sudah terlanjur akut nan kronis sehingga tidak akan pernah bisa sirna dalam kehidupan manusia.

Konflik merupakan cerminan dari ketidakharmonisan antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau satu kelompok yang berbeda keyakinan dengan kelompok yang lain. Ketika muncul prasangka dan ketidakpuasaan, maka aroma konflik mulai bisa tercium dengan sendirinya tanpa harus ditunggu sekalipun. Konflik pada umumnya bersifat laten dan menjadi bumbu kehidupan yang tidak bisa punah akibat manusia sudah dirasuki oleh ketidakpuasaan terhadap sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan pikiran, rasionalitas, dan keinginan. Lalu bagaimana sebenarnya definisi konflik sebagai sebuah term yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari?

Louis Coser³ dalam "*Functions of Social Conflict*" mengatakan bahwa konflik adalah "*a struggle over values and claim to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize injure or eliminate rivals*". Definisi Coser bila dipakai dalam studi kasus mengenai konflik di Indonesia memang masih terlalu umum dan kurang spesifik menyentuh terhadap inti persoalan yang sedang muncul. Pandangan Coser mengenai konflik lebih disadari atas rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik. Padahal beberapa studi menunjukkan bahwa aksi keagamaan dalam konteks konflik dan kekerasan, disadari atau tidak sangat sulit dipahami hanya dari aspek rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan sekalipun. Bila dicermati, berbagai tindakan kekerasan yang terkait dengan konflik keagamaan lebih banyak berasal dari sumber-sumber ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif dan simbolik. Rasionalitas yang bersifat ekspresif biasanya ditunjukkan oleh suatu komunitas agama sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas agama yang bersangkutan.

Studi fenomena konflik memang memperlihatkan sebuah ekspresi tentang fanatisme suatu kelompok tertentu yang tidak menerima terhadap perlakuan kelompok lain yang melakukan provokasi dan penistaan terhadap sebuah simbol yang disucikan. Seringkali konflik etnis menjadi pemicu lahirnya konflik agama yang berujung pada tindakan kekerasan sehingga melahirkan ketegangan yang sifatnya laten bagi ketenangan masyarakat. Tidak heran bila konflik etnis semakin memperlihatkan satukelemahan dalam penjelasan mengenai fenomena konflik yang belakangan ini merebak ke berbagai lini kehidupan.

Mengenai munculnya konflik yang mengatasnamakan etnis atau pun perbedaan keyakinan, agaknya kita perlu mencermati analisis Jacques Bertrand, yang mengatakan bahwa "*in general, theories of ethnic have been poor at differentiating between forms of conflict and better at developing theoretical propositions about the cause*

³ Louis Coser, *Functions of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1956), h. 134.

of all forms of ethnic conflict".⁴ Pernyataan Bertrand ini seolah mengindikasikan bahwa penjelasan tentang konflik etnis-keagamaan yang kurang memberikan perhatian pada variasi atau pun keunikan pola-pola konflik yang sedang terjadi sehingga tidak jarang menghasilkan suatu penelitian yang apologetik. Kendati demikian, kita tidak boleh surut oleh berbagai kritik mengenai sikap dan rasionalitas dalam menjelaskan pola-pola konflik dan kekerasan beserta persebarannya yang cukup beragam.

Perhatian kita pada pola-pola konflik pada saat peristiwa kekerasan berlangsung barangkali menjadi kekhasan tersendiri yang memungkinkan kita menjelaskan mengapa suatu bentuk konflik keagamaan muncul pada waktu dan lokasi tertentu, sementara bentuk lainnya terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda. Asumsinya adalah bahwa sebuah konflik keagamaan perlu dibedakan berdasarkan jenis isu yang menjadi sumber atau motif terjadinya pertikaian tersebut. Tidak heran bila dalam penelitian ini konflik keagamaan dipahami sebagai perseteruan menyangkut klaim dan identitas yang memunculkan isu-isu konflik dengan mempermainkan teks suci dan ajaran maupun menghina simbol agama tertentu.

Konflik keagamaan yang berlarut-larut bisa menimbulkan ketidaktenangan dalam melakukan aktifitas, bahkan tidak jarang memunculkan ketakutan yang berlebihan sehingga perasaan aman sangat sulit didapatkan. Aksi kekerasan yang menyulut api konflik secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini karena, kekerasan secara sosiologis merupakan aksi ketidakpuasan atas dinamika ketidakadilan dalam tatanan pemerintahan yang seringkali diam seribu bahasa ketika terjadi amukan massa yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Tidak heran bila konflik keagamaan bisa mewujud dalam dua jenis aksi. *Pertama*, aksi damai yang dipahami sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menyikapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian di kalangan masyarakat, apalagi isu yang muncul berupa sektarian. Aksi damai dapat berupa sikap protes atas ketidakpuasan sebuah kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku maupun aksi mediasi dalam mendukung upaya penyelesaian konflik yang telah terjadi. *Kedua*, aksi kekerasan dapat dipahami sebagai sebuah tindakan fisik yang dilakukan dalam rangka merespon isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian. Hal ini tampaknya selaras dengan teori spiral kekerasan yang ditawarkan Dom Helder Camara yang menjelaskan tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan personal, institusional, dan struktural (kekerasan yang bermula dari ketidakadilan, lalu muncul kekerasan pemberontakan sipil, dan kemudian lahir kekerasan sebagai

⁴ Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 14.

represi negara atau kekuasaan. Ketiga bentuk kekerasan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, kemunculan kekerasan yang satu disusul dan menyebabkan kemunculan kekerasan yang lain.⁵

Agama bisa terperangkap dalam spiral kekerasan ketika ia berada dalam kondisi yang tidak terjarak dengan kekuasaan. Agama akan dengan mudah menjadi justifikasi untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kekuasaan. Mengenai kekerasan yang terkait berujung pada konflik agama, St Sunardi menggolongkan konflik agama ke dalam tipe. *Pertama*, kekerasan intern agama. Para tokoh agama yang mencoba melakukan kritik internal (sebagai usaha pembaharuan atau purifikasi) harus berhadapan dengan kelompok yang menghendaki status quo. Dari situ muncul kecenderungan radikalisme progresif dan radikalisme ortodoks yang berujung pada hubungan kekerasan akibat kebuntuan komunikasi. *Kedua*, kekerasan muncul ketika agama memandang dirinya perlu melakukan tuntutan moral untuk melawannya. *Ketiga*, kekerasan muncul ketika agama merasa terancam oleh agama-agama lain. Tipe kekerasan ini dalam lintasan sejarah merupakan kekerasan agama yang sangat memilukan.⁶

Spiral kekerasan yang melahirkan konflik keagamaan sesungguhnya merupakan cermin dari ketidakadilan penguasa dalam menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat luas sehingga timbul reaksi dan aksi protes yang menyulut api kemarahan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan membuat onar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hassan Hanafi membuat penegasan perbedaan antara *oppressive violence* (kekerasan yang menindas) dan *revolutionary violence* (kekerasan revolusioner). *Oppressive violence* adalah kekerasan politik yang dilakukan oleh suatu rezim yang sedang berkuasa untuk melakukan ketidakadilan sosial dan dalam rangka mempertahankan *status quo*. Sementara *revolutionary violence* adalah bentuk pertahanan diri yang dilakukan oleh rakyat dalam kapasitasnya menentang ketidakadilan sosial dan tekanan militer. *Oppressive violence* dipahami sebagai bentuk kekerasan yang menekan, sedangkan *revolutionary violence* dipahami sebagai kekerasan yang membebaskan. Yang pertama dilakukan oleh rezim penindas dan diktator yang berkekuatan besar, sementara yang kedua dilakukan oleh rakyat yang termobilisasi oleh gerakan pembebasan, front nasional, dan kelompok revolusioner.⁷

⁵ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan*, terj. Komunitas Apiru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 145.

⁶ St. Sunardi, *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Pradoks-Pradoks*, (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 172-173.

⁷ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib, (Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 53-54.

Mencermati Isu-Isu Konflik Keagamaan: Dari Isu Sektarian Sampai Terorisme

Dalam menganalisis studi tentang fenomena konflik keagamaan, penting kiranya kita mengetahui isu-isu konflik yang berkembang dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Namun demikian, membuat katagori isu-isu konflik yang murni bersifat keagamaan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pada kenyataannya kira kerap kali menemukan bahwa isu-isu tersebut berkait kelindan dengan isu-isu lainnya, semisal politik, ekonomi, maupun budaya. Di sadari atau tidak, isu-isu konflik yang bernuansa agama bisa menimbulkan sentimen negatif dari kalangan kepercayaan lain yang tidak terima dengan pelabelan mengenai katagori yang berkaitan dengan kekerasan atas nama agama.

Pengetahuan tentang isu-isu konflik seringkali terbingkai dalam slogan atau ungkapan simbol keagamaan sebagai landasan penentuan, apakah suatu insiden merupakan insiden konflik keagamaan atau bukan. Sebagaimana diketahui bahwa isu-isu keagamaan merupakan isu-isu yang sejatinya dapat dengan mudah diidentifikasi baik yang menyangkut ajaran atau doktrin suatu agama, seperti isu prostitusi, perzinahan, perjudian, dan minuman keras. Sementara isu yang terbingkai dalam slogan dan simbol keagamaan adalah isu-isu yang sifatnya lebih umum, namun dipandang oleh komunitas agama memiliki kaitan dengan ajaran dan doktrin keagamaan, seperti isu korupsi. Kendati isu korupsi tidak terkait doktrin ajaran agama, namun bila dirangkai dalam satu ungkapan atau slogan keagamaan, misalnya dengan mengatakan "hanya dengan syariat Islam dan khilafah, korupsi dapat dihapus di Indonesia, maka insiden yang menyangkut aksi protes dapat dimasukkan dalam insiden konflik keagamaan yang berpengaruh langsung terhadap cara pandang masyarakat.

Isu-isu konflik keagamaan secara tidak langsung menjadi isu yang sangat sensitif, karena bisa menyinggung ajaran dan doktrin agama lain. Isu korupsi adalah salah satu contoh kecil yang dapat dijadikan gambaran sebagai bagian dari isu moral yang masuk dalam dalam katagori isu keagamaan. Apalagi sampai melibatkan atau mengatasnamakan kelompok keagamaan tertentu untuk mengekspresikan sebuah slogan antikorupsi yang menyangkut dorongan dalam upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan isu-isu konflik keagamaan yang sering terjadi di Indonesia, agaknya kita perlu mengetahui secara detail katagori isu-isu konflik yang menyebabkan terjadinya konflik keagamaan sehingga semakin tidak terkendali oleh aparat keamanan.

Pertama, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait dengan interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam,

misalnya munculnya kelompok Ahmadiyah,⁸ Syiah, Gafatar, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiah sebagai bagian dari kelompok keagamaan yang seringkali memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sementara dalam komunitas Kristen, terdapat konflik kepemimpinan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), yang dapat dijadikan contoh sekaligus mewakili isu sektarian yang berkembang pesat di Indonesia.

Kedua, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan atau pertikaian antar komunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak bisa selalui diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok agama tertentu. Isu yang termasuk isu komunal adalah seperti penodaan atau penistaan agama dan kasus karikatur tentang nabi Muhammad. Perseteruan atau bentrok yang menyangkut isu keagamaan-sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama, juga bisa masuk dalam katagori isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu bisa masuk dalam katagori isu sektarian. Isu komunal ternyata tidak dalam konteks komunitas agama, tetapi juga menyangkut identitas seperti ras, agama, etnis, dan budaya. Masalahnya adalah isu komunal selalu terkait dengan kepentingan identitas dengan kepentingan negara.⁹

Ketiga, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok agama tertentu, maupun serangan teror yang ditunjukkan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindakan terorisme keagamaan (*religious terrorism*), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai "tindakan simbolik" atau *performance violence*, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis.¹⁰ Ketika isu terorisme dianggap sebagai isu

⁸ Berbagai penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah sebelum periode studi ini telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, semisal di Sumatera Timur (1935), Medan (1964), Cianjur (1964, 1984), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat (1981), Surabaya (1981), Parung Bogor (1981), dan Garut (1988). Ada juga pelarangan buku-buku tentang faham Ahmadiyah di Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Kejaksaan pada 4 april 1989. Lihat Darul Aqhsa Dick van der Meij, dan Johan Hendrick Meuleman, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments From 1988 to March 1993*, (Jakarta: INIS, 1995), h. 447.

⁹ Haqqul Yaqin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), h. 51.

¹⁰ Juergensmeyer mengatakan "by calling acts of religious terrorism symbolic, I mean that they are intended to illustrate or refer to something beyond their immediate target. Misalnya, target para penyerang menara kembar WTC di Washington bukan semata-mata hancurnya bangunan tersebut, tetapi di tengah segala atribut kedigdayaan yang melekat pada negara AS sebagai sebuah negara adikuasa, ternyata negara tersebut tidak sepenuhnya aman dari serangan teror. Selain itu, serangan itu bisa juga dipahami untuk menunjukkan segi keberdayaan kelompok penyerangnya, sekaligus

keagamaan, maka dampaknya akan berakibat pada disharmonisasi antara pemeluk agama tertentu. Padahal, sejarah isu terorisme bukanlah berawal dari isu agama sebagaimana yang banyak disalahartikan oleh berbagai kalangan dari dunia Barat.

Banyak analis sepakat bahwa terorisme memiliki cara yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik. Maka kemudian sangat layak kiranya jika terorisme didefinisikan sebagai sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material, sebuah pemaksaan tingkah laku lain, sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas, sebuah tindakan kriminal bertujuan politis, kekerasan bermotifkan politis, dan sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politis atau ekonomis. Bahkan, aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan (*crime againt humanity*).¹¹

Dari sini, pengaruh utama terorisme adalah untuk menciptakan ketakutan dan kegelisahan/rasa tidak aman, dan pusat tindakan terorisme adalah berkaitan dengan alasan politis, terorisme mungkin digunakan untuk mencapai berbagai sasaran. Sebagai contoh, menyebarkan publikasi untuk alasan terorisme, hadiah khusus, provokasi penindasan yang dilakukan pemerintah, pemutusan norma-norma sosial, penegakan ketaatan internal, dan pengambilan sandera, tapi hanya beberapa. Teroris tunggal mungkin saja diarahkan untuk memenuhi beberapa sasaran hasil secara sekaligus. Bagaimanapun, harus ditekankan bahwa terorisme bukan kekerasan yang tidak logis maupun tak beralasan. Terorisme tidak bodoh/lemah, bertindak kejam tanpa pertimbangan, melainkan sengaja menggunakan strategi dengan pertimbangan waktu.

Pola-Pola Konflik Keagamaan

Penelitian tentang studi pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa ini boleh dibilang telah mengalami banyak perubahan, baik dari motif penyerangan maupun strategi dalam melakukan tindakan kekerasan. Pola konflik keagamaan bisa meliputi jenis konflik, tingkat atau frekuensi konflik, perkembangan dan persebaran konflik, isu penyebab konflik, pelaku, dan dampak dari akibat konflik tersebut. Bila dilihat pola-pola konflik keagamaan yang muncul, sebagian besar mengarah pada dua jenis insiden, yaitu aksi damai berupa aksi protes tanpa pertikaian dalam rangka menyikapi atas konflik keagamaan yang sedang terjadi, dan aksi kekerasan

mengilhami dan memotivasi pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologis untuk melakukan tindakan serupa demi menebar teror lanjutan. Lihat Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (California: University of California Press, 2003), h. 125.

¹¹Wim Beuken, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan*, terj. Imam Baihaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 8.

berupa tindakan yang berakibat jatuhnya korban jiwa manusia atau kerugian harta benda. Sementara John T. Sidel mengartikan kekerasan keagamaan (*religious violence*) sebagai “*collective physical attack on person or property launched in avowed defense or promotion of religious belief, boundaries, institutions, traditions, or values, and behind religious symbols and slogans*”.¹²

Beragam pola-pola konflik keagamaan di Indonesia biasanya dibarengi oleh aksi protes sebagai tindakan yang dilakukan terhadap suatu oposisi, pandangan, dan kebijakan yang menyangkut isu-isu keagamaan. Aksi protes dengan melibatkan banyak massa merupakan salah satu yang paling efektif untuk menuntut ketidakadilan penguasa atas merebaknya konflik yang semakin tidak terkendali. Bila kita cermati, jenis-jenis insiden kekerasan terkait konflik keagamaan dilakukan atas dasar penyerangan terhadap kelompok orang, properti, aparat pemerintah, warga asing, bentrokan antara warga, kelompok keagamaan, dan aparat keamanan, amukan massa yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Pola-pola konflik keagamaan memang cukup luas karena bentuk penyerangan yang dilakukan setiap waktunya berubah-ubah sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran. Bentuk-bentuk kekerasan terkait konflik keagamaan bisa berupa penyisiran/pengusiran, penyadaraan/penculikan, penganiayaan, penembakan/pembunuhan, penyitaan/penyegelan, perusakan, pembakaran, dan pengeboman. Kita bisa ambil contoh isu terorisme sendiri yang merupakan istilah bermakna ganda (*ambiguous*). Di kalangan akademisi atau ilmuwan sosial-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan pengertian istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satu pun definisi “terorisme” yang diterima secara universal. Ini karena, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif, sebab terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Yang jelas dan ini pasti disepakati-terorisme merupakan sebuah aksi atau tindak kekerasan (*violence*) yang merusak (*destructive*) sehingga mengakibatkan terjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.¹³

Bentuk-bentuk kekerasan dengan menggunakan ancaman ataupun teror, sebenarnya memiliki tiga unsur, yaitu tindakan atau ancaman kekerasan, reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban, dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.¹⁴ Kita bisa mengartikan bahwa isu

¹² John T. Sidel, *Riots, Programs, and Jihad: Religious Violence in Indonesia*, (Singapore: NUS Press, 2007), h. 7.

¹³ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 64.

¹⁴ Muchamad Ali Syafaat, *Terorismae, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, 2003), h. 59.

keagamaan seperti terorisme sebagai suatu penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.¹⁵

Pola-pola konflik agama seperti terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada. Di titik ini, terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Kegiatan terorisme dilakukan umumnya dengan sasaran acak, bukan langsung kepada lawan, sehingga dengan dilakukan teror tersebut, diharapkan memperoleh perhatian dari pihak yang dituju.¹⁶

Dalam menganalisis pelaku yang terlibat konflik keagamaan biasanya dapat digolongkan menjadi kelompok keagamaan, kelompok kemasyarakatan, kelompok mahasiswa, kelompok yang tidak dikenal, aparat keamanan, dan sekelompok warga. Dampak dari insiden kekerasan tentu saja sangat memilukan, karena bisa menimbulkan korban jiwa, maupun kerugian harta benda.

Akar Munculnya Konflik Agama dan Sosial

Hampir bisa dipastikan bahwa tindakan kekerasan bernuansa agama yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari doktrin dan pemahaman yang keliru tentang substansi ajaran agama. Padahal, kita sudah sering menggelar konferensi dunia mengenai agama dan perdamaian (*World Conference on Religion and Peace*), namun ternyata belum mampu membangun iman yang dapat menyejukkan dan mengurangi semakin menguatnya eskalase kekerasan di negeri kita tercinta.¹⁷ Bahkan, isu-isu kekerasan berbau SARA di lingkungan masyarakat yang beragama, termasuk di Indonesia semakin mempertebal terjadinya potensi konflik yang lebih besar. Kita memaklumi bahwa eskalase kekerasan di negeri

¹⁵Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), h. 106.

¹⁶A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim* (Jakarta: Panta Rhei, 2001), h. 151.

¹⁷J.B. Banawirata, "Agama dan Perdamaian", *Prisma*, September 1986, h. 54.

tidak mudah dihentikan dengan cepat. Ini karena, kekerasan telah menjadi budaya yang mewarnai konstelasi negara yang majemuk dan plural. Budaya kekerasan yang melekat dalam sanubari setiap elemen bangsa harus dihilangkan dari permukaan agar tidak menjadi bagian dari justifikasi kekerasan itu sendiri.

Johan Galtung (2002)¹⁸ membagi tiga tipe kekerasan yang melekat di kehidupan masyarakat. *Pertama*, kekerasan langsung yang terjadi dalam suatu peristiwa tanpa ada perencanaan sebelumnya. *Kedua*, kekerasan kultural yang biasa disampaikan dalam ceramah-ceramah agama dengan mengedepankan sentimen-sentimen suku, ras, dan agama. Kekerasan kultural dipahami sebagai bentuk propaganda melawan kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, kekerasan struktural yang dilakukan secara terorganisir dan di-*desaign* dengan sangat rapi oleh suatu kelompok pelaku anarkistis yang membenarkan tindakan kekerasan. Kekerasan struktural tidak hanya berupaya membangun kekuatan, mengorganisir kelompok, dan mewujudkan kekuasaannya, tetapi juga memecah belah dan membuat harmoni disintegratif yang semakin luas di lingkungan masyarakat.

Pembelaan terhadap simbol agama memang menjadi senjata ampuh untuk menjustifikasi tindakan kekerasan tanpa batas-batas kemanusiaan yang beradab. Pendek kata, kita boleh mengatakan bahwa kekerasan seolah-olah menjadi doktrin agama yang harus dilakukan demi mencapai tujuan tertentu yang memberikan kepuasan dan perasaan menang. Kita bisa mengandaikan bahwa kemajemukan negeri ini semakin memperlebar potensi konflik dan eskalase kekerasan yang bernuansa agama. Bahkan, agama seolah-olah dijadikan tameng untuk menghalalkan tindakan kekerasan. Menurut St. Sunardi, dalam masyarakat sekarang ini, tidak hanya terjadi eskalase kekerasan, melainkan juga *sofistikasi* kekerasan (melalui proses budaya)- bahkan *agamanisasi* kekerasan.¹⁹

Semakin meluasnya eskalase kekerasan yang menimpa negeri ini, semakin besar pula rasa pesimisme masyarakat terkait dengan jaminan keamanan yang tidak bisa terkendali. Aksi kekerasan seolah tak mengenal sekat maupun golongan, bahkan kini menimpa sebuah pondok pesantren yang menjadi pilar ilmu agama bagi masyarakat. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi terjadinya konflik dari dua faktor penting. *Pertama*, faktor dari luar agama. Faktor ini mempunyai relevansi dengan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, ketidakadilan dan kemiskinan. *Kedua*, faktor dari dalam. Tak dapat disangkal bahwa agama di dalam dirinya sendiri berpotensi memunculkan konflik yang sulit diredam. Karena itu, faktor ini merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap terjadinya konflik antar agama, sehingga perlu disikapi secara kritis-

¹⁸ Johan Galtung, *Kekerasan Budaya*, dalam Thomas Santoso (ed), *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, 2002), h. 187-188.

¹⁹ St. Sunardi, *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Paradoks-Paradoks* (Yogyakarta: LKiS, 1996), h. 161.

radikal akan arti pentingnya agama sebagai pedoman hidup (*way of life*) bagi umat manusia.²⁰

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa faktor kritis dalam konflik sosial yang berlarut-larut adalah merepresentasikan perjuangan oleh kelompok komunal, yang seringkali dilakukan dengan penuh kekerasan, untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan, dan penerimaan.²¹ Sumber utama lahirnya konflik juga berkaitan dengan perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Di mana kebutuhan manusia yang dinilai sebagai hak dasar adalah keamanan, hak mencari nafkah, akses politik, dan identitas (ekspresi budaya dan religius). Sementara kegagalan negara dalam mengatasi ini semakin memperumit kondisi konflik. Faktor dominan negara juga sangat menentukan terhadap terjadinya konflik sosial yang bersikap otoriter.

Di titik ini, fenomena kekerasan agama tidak bisa dilihat secara terpisah sebagai kekerasan agama *an-sich*, melainkan harus diamati sebagai hasil dari keterkaitan berbagai faktor, mulai dari kemiskinan, kepingangan sosial dengan sistem ekonomi yang ekspansionis, antara dominasi dan eksploitasi hingga ke sistem politik represif yang sering dijumpai di berbagai negara. Dasar dari berbagai fenomena kekerasan adalah struktur atau tatanan yang eksploitatif, di mana *overdevelopment* dan *underdevelopment* hidup berdampingan sehingga melahirkan kondisi inhuman yang mereduksi pada status benda, yang mudah dipermainkan dan dikuasai ketika dianggap tidak berguna.²² Tidak heran bila fenomena kekerasan (agama) sebagai akibat dari konflik sosial di masyarakat tidak bisa lepas dari sumber konflik global dan kekerasan kontemporer. Kekerasan juga tidak hanya berasal dari faktor psikologis individu, gejala biologis, atau faktor sosial-kultural, akan tetapi juga disebabkan oleh satu jaringan kausal antara struktur, perilaku level personal, dan level global. Artinya, setiap kerentanan psikologis dalam perilaku kekerasan juga didorong oleh kultur yang sudah meluas, sehingga kekerasan demikian merupakan hasil interaksi dialektis proses di level mikro dan makro.²³

Demi mempertegas akar munculnya konflik sosial yang bersumber dari agama, kita juga perlu menyoroti masalah perpecahan dalam konteks krisis kewibawaan agama. Pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental. Konflik sebagai kategori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan

²⁰ Syaafaatun Almirzanah, *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian; Studi Bersama Antar Iman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 10.

²¹ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 111-112.

²² I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 113-119.

²³ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002), h. 200-202.

kerukunan. Aspek perdamaian merupakan hasil dari proses dissosiatif, sementara aspek kerukunan merupakan hasil dari proses asosiatif. Proses asosiatif sifatnya adalah proses yang mempersatukan, dan proses dissosiatif sifatnya menceraikan atau memecah belah. Fokus kita tertuju pada masalah konflik atau bentrokan yang berkisar pada masalah agama. Selain perbedaan iman, sumber bentrokan juga bisa berasal dari perbedaan mental setiap umat beragama.²⁴

Kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Sesungguhnya perbedaan suku dan ras berkat adanya agama bukanlah menjadi penghalang untuk menciptakan hidup persaudaraan yang rukun. Yang menjadi masalah sekarang, apakah perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat dalam menimbulkan konflik antar sesama? Apakah dalam satu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan yang menerima adanya agama yang berbeda-beda bukannya membina dan memperkuat unsur penyebab yang lebih kuat yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan negara itu? Dapat diketahui bahwa faktor ras itu sendiri terlepas dari agama sudah membuktikan semakin bertambahnya permusuhan dan pencarian jalan keluarnya.

Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan. Kenyataan membuktikan bahwa tingkat kebudayaan di berbagai negara di dunia tidaklah sama. Kalau asumsi bahwa agama memainkan peranan dominan dalam menciptakan masyarakat budaya dan melestarikan alam semesta, maka adalah suatu kewajiban moral dari bangsa-bangsa yang agamanya kurang berfungsi untuk meninjau kembali ajaran agamanya. Hal ini tidak bermaksud untuk meragukan isi ajaran agama, melainkan untuk mencari pemahaman baru tentang agama dan melakukan reorganisasi sistem pendidikan agama, baik di tingkat intern umat beragama maupun pada tingkatan yang lebih luas. Menurut Peter L. Berger, "*religion is the enterprise by which sacred cosmos established. Put differently, religion is cosmization in sacred mode*".²⁵

Keempat, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Studi tentang masalah mayoritas dan minoritas pada umumnya bersifat naratif dan deskriptif. Dalam masalah konflik mayoritas-minoritas terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu agama diubah menjadi suatu ideologi, prasangka mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, dan mitos dari mayoritas. Dalam studi Ivan Illich tentang *Myths and Majorities*, terdapat suatu kecenderungan bahwa mayoritas memiliki kepentingan untuk dipanggil sebagai penjaga yang tak terkalahkan dari kepentingan yang telah mapan. Begitu juga dalam kajian tentang mayoritas keagamaan yang mencerminkan sebagai kekuatan yang tak

²⁴ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 151-152.

²⁵ Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion*, (New York: Penguin Books, 1973), h. 34.

terkalahkan dan satu-satunya yang berkuasan untuk menentukan dan menjaga jalannya masyarakat.²⁶ Sementara dari golongan minoritas cenderung menyadari dirinya sebagai kelompok sosial-religius yang lemah sehingga mereka menjauhkan diri dari pengaruh mayoritas ke daerah yang terpencil.

Sepertinya kelompok minoritas selalu menjadi korban ketidakadilan dan arogansi penguasa. Negara yang mestinya bersikap adil dan mengayomi minoritas malah menjadi instrumen atau alat untuk menghakimi kelompok minoritas secara masif dan sistematis. Hal ini menjadi ironi di negeri toleran yang semestinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan kemejemukan. Kelompok minoritas yang ada di Indonesia seharusnya tidak boleh diganggu, apalagi dicap sebagai kufur dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai bangsa yang majemuk, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjamin kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kebhinnekaan.

Urgensi Penerapan Resolusi Konflik Keagamaan

Berbagai konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin menunjukkan potret matinya spirit kebebasan beragama di Indonesia saat ini. Sebagai bangsa yang majemuk, ternyata kita tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi kelompok kepercayaan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, boleh dibilang negara ini gagal dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan warganya. Padahal, manusia diberi hak oleh Allah untuk memilih beragama atau tidak beragama.²⁷ Dimana yang menjadi pijakan bagi orang yang beragama adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap agama orang lain, bukan justru saling menyimpan api kebencian dan permusuhan antar sesama.

Pemaksaan terhadap seseorang untuk mengikuti agama tertentu adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dibenarkan. Mengingat, setiap individu memiliki pandangan yang tidak mungkin sama sehingga ia bebas memilih agamanya sesuai dengan kebenaran hati nurani yang paling dalam. Kebenaran menurut hati nurani adalah suatu pilihan yang tidak bisa dicampuri, apalagi mencabik-cabik hak-hak dan kebebasan orang lain. Ini karena, kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki norma-norma yang dapat menjadi landasan pokok umat manusia.

Sebagai sebuah pilihan dengan sukarela, keberadaan agama berhak dianut oleh siapa saja, dan kita tidak punya wewenang untuk memberikan pilihan, apalagi memaksa orang lain masuk pada agama kita. Demikian pula, sikap

²⁶ Ivan Illich, *Tools for Conviviality*, (London: Calder & Boyars, 1989), h. 102.

²⁷ Zakiyudin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, h. 42.

menilai apakah seseorang itu beriman atau tidak beriman bukan wewenang kita. Menilai keimanan atau kekafiran sepenuhnya menjadi "hak prerogatif" Allah, dan penghakiman atas tindakan yang menyangkut keyakinan, kepercayaan, dan keimanan merupakan antitesis terhadap otoritas Allah. Orang yang melakukan tindakan semacam ini oleh Khaled Abu el-Fadl (2001) disebut sebagai "sekuler sejati" atau "otoriter".²⁸

Inklusivitas menjadi penting untuk menumbuhkan sikap keterbukaan demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang damai, sejahtera, dan bahagia. Mengingat, potensi konflik yang disebabkan perbedaan orientasi keberagamaan sangat rentan sekali memecah belah umat sehingga terkubur oleh egoisme dan fanatisme keagamaan yang berlebihan. Di sinilah, kita perlu membangun kesadaran pribadi dalam memahami realitas bangsa yang plural dari berbagai aspek. Di samping itu, kedewasaan beragama juga harus menjadi prinsip yang perlu dikedepankan ketimbang tindakan kekerasan yang pada akhirnya menghancurkan agama kita sendiri.

Menyikapi semakin meluasnya konflik dan kekerasan agama, maka teori tentang resolusi konflik menjadi penting untuk diterapkan dalam berbagai munculnya tindakan kekerasan di negeri ini. Upaya resolusi konflik harus mampu menyelesaikan atau memperkecil masalah keadilan dan pemerataan. Untuk tujuan itu, proses resolusi yang perlu dikembangkan adalah melalui kontrak sosial dan dengan prinsip yang menekankan pada *justice and equality*. Menimbang masing-masing peran yang berbeda, maka pada tingkat tindakan upaya resolusi ini dapat berbeda-beda langkahnya. Namun semua mengacu pada sebuah tujuan yang sama dan langkah operasionalnya harus dipilah menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam rangka menghentikan tindakan kekerasan yang berlarut-larut, studi tentang resolusi konflik bukan saja hanya dalam retorika belaka, melainkan harus ada implementasi yang jelas terkait dengan pencegahan konflik agar tidak terulang kembali. Ada dua manfaat bagi mengeksplorasi hubungan antara agama dan resolusi konflik. Pertama, mendapatkan informasi dalam teks suci tentang pentingnya membangun perdamaian demi menghindari konflik secara berkelanjutan. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam mencermati hubungan kekerasan dengan keberagaman seseorang dalam ruang lingkup budaya di masyarakat. Tidak heran bila kajian tentang resolusi konflik perhatian perlu mendapatkan perhatian kritis dari semua pihak yang memiliki perhatian

²⁸ Menurut Khaled, apa yang dapat dicapai oleh manusia dalam hal beragama tidak lebih dari pemahaman atau penafsiran yang bersifat otoritatif atas ajaran-ajaran agamanya. Pemahaman yang otoritatif tidak menutup bagi penafsir lain untuk berbeda interpretasi tentang suatu ajaran agama. Oleh karena itu, klaim sewenang-wenang sebagai yang paling benar sejauh mungkin harus dihindarkan. Jika tidak, maka orang beragama dapat terjerumus ke dalam kubangan otoritarianisme, otoritas, dan otoritatif. Lihat Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publication, 2001), h. 137.

penuh terhadap terciptanya perdamaian dunia. Kedua, agama memainkan peranan penting dalam dinamika kehidupan dan perilaku sosial jutaan manusia yang banyak dipengaruhi oleh aktifitas perjuangan melawan tindakan kekerasan yang bersifat sektarian maupun komunal.²⁹

Teori tentang perdamaian dan resolusi konflik membutuhkan analisis yang lebih mendalam dari tokoh pemimpin di masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan advokasi dan aksi damai dengan kelompok yang dianggap musuh. Di sana ada sejumlah jalan yang berkaitan dengan tradisi dan keagamaan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian resolusi konflik. Dalam konteks pandangan negatif, semisal mengkaji tradisi, agama, dan hukum yang dianggap berbahaya bagi kemunculan budaya kekerasan di lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk merespon konflik sebelum terjadi dan gejala-gejala konflik yang tidak bisa dikontrol.

Sementara dalam pandangan positif, studi resolusi konflik seharusnya menguji jalan koeksistensi dengan komunikasi yang dianggap ideal. Para pemimpin tradisi keagamaan perlu mengekspresikan komitmen retorik untuk membangun perdamaian, karena isu ini adalah sesuatu yang sangat krusial demi mempermudah strategi dialog dan negosiasi tentang resolusi konflik. Misalnya dengan proses transformasi spiritual melalui refleksi dan peningkatan etika dari perilaku seseorang. Itulah sebabnya, beberapa teori tentang resolusi konflik menjadi penting bagi transformasi personal untuk melahirkan komitmen bersama demi tatanan kehidupan yang lebih menjanjikan.³⁰

Penutup

Pada akhirnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola-pola konflik keagamaan di Indonesia. Dari segi tingkat insiden, penelitian ini menemukan bahwa dua pertiga dari konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia mengambil bentuk aksi damai, sepertiganya yang terwujud dalam bentuk aksi kekerasan. Yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana mendorong masyarakat agar menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama dalam merespons berbagai isu keagamaan yang menjadi penyebab atau pemicu konflik. Jenis insiden kekerasan baik aksi damai maupun kekerasan sebagian besar terjadi terkait dengan isu-isu komunal, seperti konflik antara komunitas muslim-kristen dan penodaan agama.

²⁹ Marc Gopin, *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 14.

³⁰ *Ibid*, h. 19.

Referensi

- Almirzanah, Syafaatun. 2002. *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian; Studi Bersama Antar Iman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aqhsa, Darul, Dick van der Meij, dan Meuleman, Johan Hendrick. 1995. *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments From 1988 to March 1993*. Jakarta: INIS.
- Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: PSAP.
- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beuken, Wim. 2003. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan*, terj. Imam Baihaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, Peter L. 1973. *The Social Reality of Religion*. New York: Penguin Books.
- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*, terj. Komunitas Apiru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coser, Louis. 1956. *Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- El-Fadl, Khaled Abou. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publication.
- Fauzi, Ihsan Ali, Rudi Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Pangabean. 2009. *Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Galtung, Johan. 2002. *Kekerasan Budaya*, dalam Thomas Santoso (ed), *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra.
- Gopin, Marc. 2000. *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religious, Violence, and Peacemaking*. New York: Oxford University Press.
- Hanafi, Hassan. 2001. *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib. Yogyakarta: Jendela.
- Hendropuspito, D. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Illich, Ivan. 1989. *Tools for Conviviality*. London: Calder & Boyars.
- Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. California: University of California Press.
- Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- Mohamad, Simela Victor. 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbothm, dan Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio. Jakarta: Rajawali Press.112.
- Merrill, J.C. & R.L. Lowenstein. 1971. *Media, Messages, and Men*. New York: David MacKay.
- Nashir, Haidar. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
- Nasher, Haidar. 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Syafaat, Muchamad Ali. 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- Sidel, John T. 2007. *Riots, Programs, and Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- St. Sunardi. 1996. *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Paradoks-Paradoks*. Yogyakarta: LKiS.
- Sue, Morgan dkk. 2002. *Agama Emperis; Agama Dalam Pergumulan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunardi, St. 1996. *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Pradoks-Pradoks*. Yogyakarta: LKiS.
- Windu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yaqin, Haqqul. 2009. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press.